

STRATEGI KOMUNIKASI KRISIS FH UI DALAM MERESPONS VIRALITAS ISU PELECEHAN SEKSUAL DI MEDIA SOSIAL

Intan Puspitasari¹, Abdul Aziz², Edison Bonar Tua Hutapea³

^{1, 2, 3}Universitas Paramadina, Jl. Raya Mabes Hankam, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia

Email: intan.puspitasari@students.paramadina.ac.id

Article History

Received: 17-04-2026

Revision: 08-05-2026

Accepted: 15-05-2026

Published: 24-05-2026

Abstract. This study aims to analyze the crisis communication strategies implemented by the Faculty of Law, Universitas Indonesia (FH UI) in responding to digital sexual harassment issues involving 16 students from the 2023 cohort. This phenomenon represents an anomaly as it occurred within a legal education institution and involved a massive number of perpetrators within digital spaces. The research method employed is descriptive qualitative with a case study approach. Data were gathered through the observation of official statements on social media platforms and press releases from the UI Task Force for the Prevention and Handling of Sexual Violence (Satgas PPKS). The analysis was conducted using the Situational Crisis Communication Theory (SCCT). The results indicate that FH UI implemented diminish and bolstering strategies through transparency in internal hearing processes and the deactivation of perpetrators from student organizations. Although the initial response was considered swift, social media virality reflected significant public pressure on the institution's reputation. This study concludes that coordination between tactical units such as Satgas PPKS and deanery management is crucial in mitigating the impact of reputation crises in the digital era. Furthermore, this research contributes to the development of social media-based crisis mitigation protocols for higher education institutions.

Keywords: Crisis Communication, Digital Sexual Harassment, FH UI, Satgas PPKS, Social Media

Abstrak. Strategi komunikasi krisis yang diterapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) dalam merespons isu pelecehan seksual digital yang melibatkan 16 mahasiswa angkatan 2023. Fenomena ini menjadi anomali karena terjadi di institusi hukum dan melibatkan jumlah pelaku yang masif di ruang digital. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi pernyataan resmi di media sosial dan rilis pers Satgas PPKS UI. Analisis dilakukan menggunakan Situational Crisis Communication Theory (SCCT). Hasil penelitian menunjukkan bahwa FH UI menerapkan strategi diminish dan bolstering melalui transparansi proses sidang internal dan penonaktifan pelaku dari organisasi kemahasiswaan. Meskipun respons awal dinilai cepat, viralitas di media sosial menunjukkan adanya tekanan publik yang besar terhadap reputasi institusi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa koordinasi antara unit taktis seperti Satgas PPKS dan manajemen dekanat sangat krusial dalam memitigasi dampak krisis reputasi di era digital. Hasil studi ini diharapkan menjadi referensi dalam pengembangan protokol komunikasi krisis berbasis media sosial di lingkungan perguruan tinggi.

Kata Kunci: Crisis Communication, Digital Sexual Harassment, FH UI, Satgas PPKS, Social Media

How to Cite: Puspitasari, I., Aziz, A., & Hutapea, E. B. T. (2026). Strategi Komunikasi Krisis FH UI dalam Merespons Viralitas Isu Pelecehan Seksual di Media Sosial. *HORIZON: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, 4 (3), 974-985. <http://doi.org/10.54373/hijm.v4i3.5394>

PENDAHULUAN

Fenomena kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi telah menjadi isu krusial yang mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat luas dalam beberapa tahun terakhir. Kehadiran Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi menjadi tonggak formalitas hukum dalam upaya menciptakan ruang aman akademis. Namun, meskipun regulasi telah ditegakkan, kompleksitas kasus kekerasan seksual terus berkembang, terutama dengan penetrasi teknologi digital yang melahirkan bentuk-bentuk pelecehan baru di ruang siber. Salah satu peristiwa yang memicu guncangan hebat dalam opini publik adalah isu dugaan pelecehan seksual digital yang melibatkan 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) angkatan 2023 pada April 2026.

Secara teoretis, komunikasi dalam kasus ini dapat dibedah melalui berbagai level. Morissan (2021) dalam bukunya *Teori Komunikasi: Individu Hingga Massa* menjelaskan bahwa interaksi manusia terjadi secara sistematis mulai dari level intrapersonal, interpersonal, kelompok, hingga komunikasi massa. Dalam kasus FH UI, krisis bermula dari komunikasi kelompok di ruang privat digital (WhatsApp/LINE) yang kemudian bereskalasi menjadi konsumsi massa akibat viralitas media sosial. Hal ini sejalan dengan pemikiran Littlejohn & Foss (2017) dalam *Theories of Human Communication* yang menekankan bahwa realitas sosial dikonstruksi melalui proses komunikasi. Ketika percakapan digital yang mengandung objektifikasi seksual tersebar ke ruang publik, terjadi pergeseran makna dari sekadar "obrolan internal" menjadi sebuah pelanggaran etika dan hukum yang nyata di mata publik.

Kasus ini merupakan sebuah anomali yang sangat tajam. Pertama, institusi tempat peristiwa ini terjadi adalah fakultas hukum, di mana mahasiswanya diasumsikan memiliki tingkat literasi hukum yang tinggi. Kedua, jumlah pelaku yang masif menunjukkan adanya pola perilaku kolektif. Ketiga, medium digital yang digunakan membuktikan bahwa ruang siber seringkali menjadi tempat terjadinya kekerasan verbal yang sistematis. Penelitian terdahulu oleh Rhafidilla & Yasmin (2024) menyoroti betapa pentingnya persepsi mahasiswa mengenai ruang aman dari kekerasan seksual di kampus. Namun, penelitian tersebut lebih banyak memotret sisi pencegahan umum, bukan strategi komunikasi krisis institusi saat menghadapi skandal kolektif.

Penelitian lain yang relevan dilakukan oleh humas di universitas lain, seperti studi kasus penanganan pelecehan seksual oleh Humas Universitas Andalas, menunjukkan bahwa transparansi dan kecepatan rilis pers adalah kunci utama (Humas Unand, 2023). Terdapat kekosongan literatur (*gap analysis*) dalam mendiskusikan bagaimana institusi hukum seperti

FH UI merespons krisis yang melibatkan 16 orang sekaligus di era viralitas. Belum banyak kajian yang membedah spesifikasi komunikasi krisis pada institusi hukum yang memiliki beban ekspektasi moral lebih tinggi. Hal inilah yang menjadi kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini.

Meskipun penelitian terdahulu mengenai komunikasi krisis di perguruan tinggi telah banyak dilakukan seperti studi kasus pada Humas Universitas Andalas (2023) yang menekankan pada aspek transparansi dan kecepatan rilis kajian tersebut belum cukup memadai untuk membedah kompleksitas krisis di institusi hukum seperti FH UI. Terdapat perbedaan fundamental dalam aspek ekspektasi publik yang menciptakan celah penelitian (*research gap*).

Kasus ini memicu apa yang disebut sebagai Moral Incongruity (ketidaksesuaian moral) yang akut. Sebagai 'Kawah Candradimuka' calon penegak hukum, FH UI memikul beban moral ganda (*double moral burden*): di satu sisi sebagai institusi pendidikan, dan di sisi lain sebagai simbol integritas hukum. Ketika 16 mahasiswanya terlibat dalam pelecehan seksual kolektif, publik tidak hanya melihatnya sebagai pelanggaran etika biasa, melainkan sebagai paradoks terhadap literasi hukum yang mereka pelajari. Ketidaksesuaian antara identitas institusi yang menjunjung tinggi keadilan dengan perilaku subjek di dalamnya menciptakan guncangan reputasi yang lebih destruktif dibandingkan institusi non-hukum. Oleh karena itu, strategi komunikasi krisis yang dilakukan tidak bisa hanya bersifat administratif-teknis, melainkan harus mampu menjawab krisis legitimasi moral tersebut. Inilah yang menjadi kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini, di mana analisis SCCT akan dikontekstualisasikan pada institusi yang memiliki standar moral tinggi di mata masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi krisis yang diterapkan oleh FH UI dan Satgas PPKS UI. Analisis ini sangat penting karena respons institusi pendidikan terhadap isu kekerasan seksual di era media sosial bukan sekadar masalah administrasi, melainkan bentuk dari branding institusi dan komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi manajemen krisis digital dan referensi praktis bagi perguruan tinggi lain dalam menyusun protokol komunikasi krisis yang responsif dan transparan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai strategi komunikasi krisis yang diterapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI). Pemilihan metode studi kasus didasarkan pada kemampuannya dalam mengeksplorasi fenomena secara mendalam dalam

konteks yang terikat, khususnya dalam situasi krisis organisasi yang kompleks dan dinamis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menginterpretasikan makna di balik respons institusi terhadap tekanan publik, sejalan dengan pandangan Littlejohn dan Foss yang menekankan bahwa penelitian komunikasi kualitatif berfokus pada pemahaman fenomena sosial secara interpretatif. Penelitian ini dilaksanakan melalui tahapan yang dirancang secara sistematis guna memastikan alur analisis berjalan terstruktur dan sesuai dengan tujuan penelitian. Tahap awal dimulai dengan observasi digital terhadap perkembangan isu yang viral di media sosial, khususnya pada platform X dan Instagram, yang membahas dugaan pelecehan seksual digital yang melibatkan mahasiswa FH UI angkatan 2023. Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi pola narasi, aktor yang terlibat, serta dinamika penyebaran informasi di ruang publik digital. Selanjutnya, peneliti melakukan pengumpulan data melalui dokumentasi berbagai sumber resmi, termasuk rilis pers, pernyataan dekanat, serta konten edukasi yang dipublikasikan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) UI. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan kerangka teoretis, yaitu klasifikasi level komunikasi menurut Morissan serta *Situational Crisis Communication Theory* (SCCT), untuk mengidentifikasi jenis strategi komunikasi yang digunakan oleh institusi dalam merespons krisis. Dalam proses pengumpulan data, penelitian ini memanfaatkan dua teknik utama, yaitu studi dokumentasi dan observasi netnografi. Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah secara kritis seluruh pernyataan tertulis yang dirilis oleh pihak FH UI dan Satgas PPKS UI selama periode krisis yang berlangsung pada 11 hingga 14 April 2026. Analisis difokuskan pada struktur pesan, kejelasan informasi, serta ketepatan waktu dalam penyampaian komunikasi kepada publik. Sementara itu, observasi netnografi dilakukan untuk menangkap respons dan sentimen publik melalui interaksi yang terjadi di media sosial, khususnya pada kolom komentar akun Instagram resmi seperti @kemahasiswaan_fhui dan @satgasppks_ui. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami persepsi publik secara lebih kontekstual sebagai indikator efektivitas komunikasi krisis institusi.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang terdiri atas tiga tahapan yang berlangsung secara simultan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta verifikasi dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan seleksi terhadap informasi yang relevan dengan fokus penelitian serta menyederhanakan data mentah ke dalam kategori yang lebih terstruktur. Tahap penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian deskriptif yang disusun secara kronologis untuk mempermudah pemahaman terhadap pola respons institusi. Selanjutnya, pada tahap verifikasi, peneliti mengevaluasi efektivitas strategi

komunikasi krisis yang diterapkan, seperti strategi diminish atau bolstering, dalam menjawab permasalahan penelitian serta merespons ekspektasi publik secara solutif. Penelitian ini dilaksanakan secara virtual dengan berfokus pada kanal komunikasi resmi Universitas Indonesia sebagai sumber utama data. Proses penelitian dilakukan secara intensif dengan mengikuti perkembangan kasus hingga tahap akhir, yaitu pengumuman sanksi administratif terhadap 16 pelaku.

HASIL

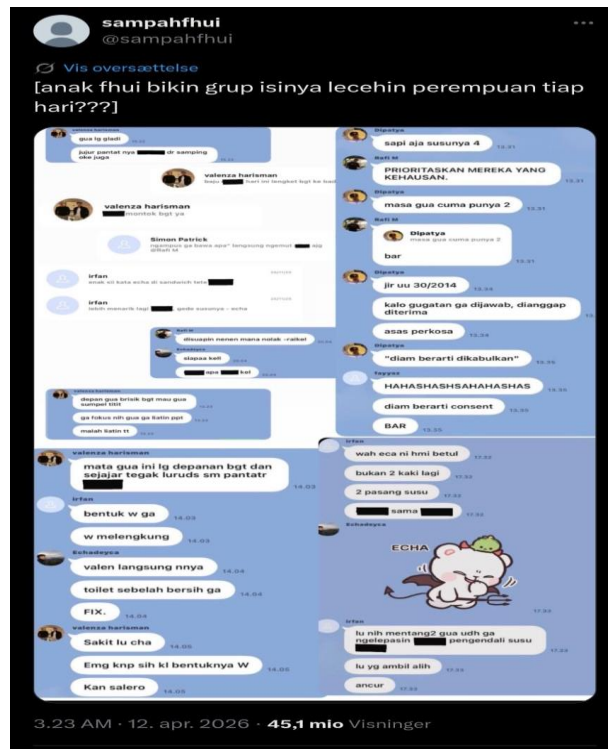
Kronologi Eskalasi Krisis dan Respons Institusi (Unsur *What/How*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis komunikasi di lingkungan FH UI berkembang secara cepat di ruang digital setelah isu tersebut viral di platform X. Dalam kurun waktu kurang dari 24 jam, institusi mulai melakukan langkah mitigasi awal melalui pemantauan isu dan penyampaian respons awal kepada publik. Untuk menggambarkan dinamika peristiwa secara utuh, peneliti menyajikan kronologi kejadian pada Tabel 2 serta bukti visual pada gambar berikut.

Tabel 1. Kronologi peristiwa isu pelecehan seksual digital FH UI (April 2026)

Tanggal	Waktu	Peristiwa Utama	Tindakan Komunikasi Institusi
11 April	19.00 WIB	Utas (thread) viral di platform X, mengungkap bukti chat grup 16 mahasiswa.	Pemantauan isu oleh tim media sosial dan dekanat.
12 April	10.00 WIB	Gelombang kemarahan publik meningkat drastis di Instagram FH UI.	Rilis Pernyataan Sikap: Dekanat mengecam keras tindakan pelaku.
12 April	22.00 WIB	Pelaku menyampaikan permintaan maaf terbuka di grup internal angkatan.	Satgas PPKS UI mengonfirmasi penerimaan laporan resmi.
13 April	09.00 WIB	Agenda sidang internal dimulai (awal pemeriksaan para terduga pelaku).	Pemberian informasi berkala mengenai transparansi sidang.
14 April	14.00 WIB	Seluruh 16 pelaku berhasil dihadirkan dalam forum sidang internal.	Penegasan proses hukum internal tanpa intervensi pihak luar.
15 April	11.00 WIB	Pengumuman sanksi administratif (penonaktifan dari organisasi).	Rilis Keputusan Akhir dan tindak lanjut sanksi akademik.

Tabel 1 di atas menggambarkan bahwa institusi mengambil langkah taktis yang responsif guna meredam sentimen negatif publik yang dapat merusak reputasi akademik secara permanen.



Gambar 1. Tangkapan layar percakapan grup yang menjadi pemicu viralitas isu di media sosial. (Sumber: dokumentasi peneliti dari platform X, April 2026)

Unggahan tersebut menjadi titik awal eskalasi krisis karena memuat percakapan yang dianggap merendahkan perempuan dan menyebar luas di ruang digital.



Gambar 2. Respon pihak UI melalui media terkait proses penanganan kasus. (Sumber: dokumentasi peneliti dari media sosial Kompas TV, April 2026)

Respons institusi menunjukkan strategi awal berupa pengakuan isu, investigasi, dan penyampaian proses penanganan kepada publik.



Gambar 3. Contoh respons publik di platform X dan instagram terhadap kasus yang viral. (Sumber: dokumentasi peneliti, April 2026)

Komentar publik menunjukkan polarisasi opini, mulai dari kecaman moral, kritik terhadap institusi, hingga pembelaan terhadap pelaku.

Analisis Netnografi: Dinamika Viralitas dan Resonansi Publik

Peneliti melakukan observasi netnografi pada platform X dan Instagram untuk memetakan reaksi publik terhadap krisis FH UI. Hasil analisis menunjukkan bahwa platform X menjadi *catalyst* utama dengan viralitas utas mencapai 45,1 juta tayangan. Skala ini memaksa isu berpindah dari ruang privat digital ke ranah konsumsi massa nasional secara instan. Kategorisasi sentimen terhadap 500 komentar teratas disajikan dalam Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Tipologi respons netizen terhadap krisis FH UI

Kategori Sentimen	Narasi Utama	Dampak Reputasi
Kecaman (45%)	Kontradiksi status "mahasiswa hukum" dengan perilaku pelecehan.	Delegitimasi moral institusi.
Tuntutan (30%)	Desakan sanksi <i>Drop Out</i> dan transparansi identitas pelaku.	Tekanan pada otoritas dekanat.
Dukungan (20%)	Apresiasi terhadap keberanian pelapor dan kecepatan respons Satgas.	Pemulihan citra parsial.

Data ini mengonfirmasi bahwa sentimen negatif dipicu oleh tingginya ekspektasi publik terhadap literasi hukum mahasiswa FH UI. Namun, respons institusi dalam waktu kurang dari 24 jam berhasil menciptakan resonansi positif (20%) yang meredam eskalasi krisis agar tidak menjadi permanen. Fenomena ini mempertegas bahwa di era digital, kecepatan respons (*responsiveness*) adalah kunci dalam manajemen krisis reputasi.

Dinamika Pesan dalam Ruang Digital: Perspektif Proses dan Fungsi

Dalam membedah kasus ini, penting untuk melihat bagaimana pesan krisis bermula dan berkembang. Hutapea (2024) menjelaskan bahwa fungsi komunikasi tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai instrumen kontrol sosial dan pembentuk citra. Dalam kasus FH UI, "fungsi" komunikasi kelompok di grup WhatsApp yang awalnya bertujuan untuk keakraban antar-anggota (fungsi sosial), bergeser menjadi malfungsi komunikatif ketika kontennya mengandung objektifikasi seksual. Ketika pesan privat ini bocor ke ranah publik, terjadi perubahan tatanan komunikasi dari level kelompok ke level massa. Hal ini sejalan dengan pandangan Morissan (2021) bahwa di era komunikasi massa digital, batasan antara ruang privat dan publik menjadi sangat bias. Viralitas yang terjadi merupakan bentuk "umpan balik" (*feedback*) massa yang masif terhadap kegagalan fungsi etika komunikasi individu para pelaku.

Analisis Strategi Krisis berdasarkan *Situational Crisis Communication Theory* (SCCT)

Institusi FH UI menghadapi apa yang diistilahkan oleh Littlejohn & Foss (2017) sebagai guncangan pada konstruksi realitas sosial organisasi. Reputasi institusi hukum yang selama ini dibangun sebagai simbol keadilan, seketika dikonstruksi ulang oleh publik menjadi ruang yang dianggap "permisif" terhadap pelecehan akibat tindakan kolektif ke-16 mahasiswa tersebut. Peneliti melihat bahwa dalam upaya memulihkan realitas ini, FH UI memilih jalur transparansi radikal alih-alih menutup diri, mengingat realitas sosial di era digital dikonstruksi melalui proses komunikasi yang sangat dinamis. Berdasarkan analisis SCCT, FH UI menerapkan dua strategi utama untuk merespons guncangan reputasi ini:

Strategi *Diminish* (Mengurangi Dampak): Strategi ini dilakukan melalui penggunaan diksi "oknum" secara konsisten dalam setiap rilis resmi. Tujuannya adalah untuk mengonstruksi pemahaman publik bahwa pelecehan tersebut merupakan perilaku menyimpang kelompok kecil dan bukan representasi dari budaya pendidikan maupun nilai-nilai integritas FH UI secara keseluruhan. Strategi *Bolstering* (Penguatan): Institusi berupaya memperkuat citra positifnya dengan menonjolkan peran otoritas formal, dalam hal ini Satgas PPKS UI. Langkah ini sejalan dengan temuan Sari & Rahardjo (2023) yang menyebutkan bahwa institusi pendidikan sering kali menggunakan unit teknis profesional sebagai "tameng" untuk membuktikan kepada publik bahwa sistem organisasi tetap berjalan dengan tegas dan patuh pada regulasi, meskipun terjadi pelanggaran oleh anggotanya.

Hasil penelitian ini memperkuat temuan Wibowo (2022) menyatakan bahwa dalam krisis digital, kecepatan respons (*responsiveness*) lebih dihargai publik daripada akurasi data yang terlalu lama diproses birokrasi. FH UI merespons dalam waktu kurang dari 24 jam, yang secara signifikan meredam sentimen negatif dibandingkan kasus pelecehan di universitas lain yang cenderung tertutup pada awalnya. Selain itu, penelitian Lestari et al., (2024) menekankan bahwa keterlibatan aktif pimpinan institusi dalam memberikan pernyataan langsung (bukan hanya rilis teks) sangat krusial. Dalam kasus FH UI, kehadiran Dekanat dalam mengawal sidang pada 13-14 April menunjukkan penerapan fungsi komunikasi sebagai tatanan manajerial yang solid, sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Hutapea mengenai pentingnya kepemimpinan dalam proses komunikasi organisasi.

Analisis Molekular: Konstruksi Diksi dan Narasi dalam Rilis Pers Institusi

Peneliti melakukan kajian mendalam hingga level molekular terhadap diksi yang digunakan dalam rilis pers resmi FH UI sepanjang periode krisis. Sebagaimana disarankan oleh Hutapea (2024), pilihan kata dalam komunikasi bukan sekadar instrumen penyampai pesan, melainkan upaya strategis untuk menjaga tatanan sosial dan membangun kembali citra institusi yang terdistorsi. Berdasarkan amatan peneliti, terdapat tiga tipologi diksi utama yang dikonstruksi oleh institusi untuk mengelola persepsi public.

Pertama, penggunaan diksi "Oknum" dan "Individu". Peneliti menemukan bahwa dalam rilis awal, institusi secara konsisten menggunakan kata tersebut guna memutus asosiasi negatif antara perilaku menyimpang 16 mahasiswa dengan sistem pendidikan di FH UI secara keseluruhan. Berdasarkan teori Morissan (2021), teknik ini merupakan bentuk *crisis containment* (pembatasan krisis) agar kegagalan etika personal tidak dianggap sebagai kegagalan sistemik fakultas dalam mendidik mahasiswanya. Penggunaan diksi "oknum" dan "individu" secara konsisten oleh FH UI merupakan refleksi dari dinamika kekuasaan (*power dynamics*) untuk melindungi otoritas institusi. Berdasarkan teori tatanan komunikasi Hutapea (2024), strategi ini berfungsi sebagai instrumen kontrol untuk memitigasi dampak sistemik dengan cara:

- Pembatasan krisis (*crisis containment*): melalui pelabelan "oknum", institusi secara simbolis memutus hubungan antara perilaku menyimpang 16 mahasiswa dengan integritas sistem pendidikan FH UI secara keseluruhan.
- Legitimasi otoritas: institusi menggunakan jargon legalistik untuk menunjukkan bahwa kendali penuh berada di tangan dekanat dan Satgas PPKS, guna meredam desakan publik yang cenderung emosional.

- Manajemen tempo: diksi "dugaan" digunakan untuk memperlambat tensi publik dan mengembalikan isu ke dalam koridor birokrasi sidang internal yang lebih terkendali.

Kedua, narasi "Ruang Aman" dan "Zero Tolerance". Diksi ini dimunculkan sebagai representasi komitmen institusi terhadap Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021. Sari & Rahardjo (2023) menyatakan bahwa penggunaan istilah legalistik semacam ini berfungsi memberikan rasa tenang (*sense of security*) kepada pemangku kepentingan, khususnya mahasiswi dan orang tua. Dengan mengonstruksi realitas melalui jargon "tidak ada toleransi," FH UI berupaya memposisikan diri sebagai pembela korban sekaligus menegaskan fungsi kontrol sosial yang kuat.

Ketiga, penggunaan eufemisme strategis dalam frasa "Penonaktifan Sementara". Pemilihan frasa ini alih-alih menggunakan kata "pemecatan" menunjukkan kehati-hatian hukum yang mendalam. Peneliti menganalisis bahwa sebagai fakultas hukum, FH UI memahami prosedur sanksi akademik berat (seperti *Drop Out*) memerlukan birokrasi yang panjang. Oleh karena itu, diksi penonaktifan organisasi dipilih sebagai solusi komunikasi jangka pendek untuk meredam kemarahan netizen. Hal ini sejalan dengan temuan Wibowo (2022) bahwa publik digital cenderung merasa puas secara instan ketika melihat adanya konsekuensi sosial yang diberikan secara cepat kepada pelaku.

Meskipun demikian, peneliti mencatat adanya kesenjangan (*gap*) antara diksi resmi institusi dengan ekspektasi publik. Perbedaan tatanan komunikasi massa yang dijelaskan Littlejohn & Foss (2017) terlihat saat institusi menggunakan diksi "dugaan pelecehan" demi menjaga asas praduga tak bersalah, sementara netizen justru menggunakan kata "kejahatan seksual" demi menuntut keadilan. Kemampuan akun @kemahasiswaan_fhui dalam menjembatani gap diksi ini melalui interaksi di kolom komentar menjadi elemen krusial dalam keberhasilan manajemen krisis ini, sebagaimana yang ditekankan dalam studi Lestari et al., (2024). Studi kasus ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam interpretasi hasilnya: Fokus Data Eksternal: Penelitian ini sepenuhnya mengandalkan data sekunder berupa pernyataan resmi institusi dan observasi aktivitas media sosial (Instagram dan X). Peneliti tidak melakukan wawancara mendalam (*In-depth Interview*) secara langsung dengan pihak Dekanat FH UI maupun Satgas PPKS UI.

Analisis Motif Internal: Tanpa adanya data primer dari pihak internal, penelitian ini tidak dapat membedah secara pasti motif di balik pemilihan diksi tertentu atau dinamika pengambilan keputusan di ruang rapat pimpinan institusi. Perspektif Korban: Kajian ini lebih berfokus pada strategi komunikasi institusi dan respons publik secara makro, sehingga belum memotret efektivitas komunikasi krisis ini dari perspektif pemulihan psikologis korban secara

personal. Rentang Waktu Observasi: Observasi dilakukan secara intensif pada periode puncak krisis (11-14 April 2026), sehingga dampak jangka panjang dari strategi *bolstering* terhadap reputasi permanen institusi mungkin memerlukan kajian lebih lanjut di masa depan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi komunikasi krisis yang diterapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) dalam merespons isu pelecehan seksual digital mahasiswa angkatan 2023 adalah kombinasi taktis antara strategi *diminish* dan *bolstering*. Melalui penggunaan diksi "oknum" dan narasi "ruang aman", FH UI melakukan upaya dekopling (pemisahan) untuk mengatasi fenomena *Moral Incongruity*. Strategi ini bertujuan untuk mereduksi persepsi publik bahwa perilaku menyimpang tersebut merupakan kegagalan sistemik institusi hukum, melainkan murni kegagalan etika individu yang bertentangan dengan nilai-nilai akademik fakultas.

Penelitian ini menemukan bahwa sebagai institusi hukum, FH UI memikul beban moral ganda (*double moral burden*). Keberhasilan institusi dalam meredam eskalasi krisis dalam waktu kurang dari 24 jam menunjukkan efektivitas fungsi komunikasi sebagai kontrol sosial. Namun, terdapat celah komunikasi (*communication gap*) antara diksi formal dekanat yang cenderung legalistik dengan tuntutan keadilan radikal dari masyarakat digital. Hal ini membuktikan bahwa dalam krisis yang melibatkan ketidaksesuaian moral yang tajam, kecepatan respons harus dibarengi dengan narasi yang mampu menyentuh aspek rasa keadilan publik.

Sebagai kontribusi praktis, penelitian ini merekomendasikan agar perguruan tinggi, khususnya yang berbasis pendidikan hukum dan etika, menyusun protokol komunikasi krisis yang menyeimbangkan antara kepastian legal administratif dan sentimen empati digital. Koordinasi antara manajemen dekanat dan unit taktis seperti Satgas PPKS perlu diperkuat melalui sistem edukasi literasi digital guna mencegah malfungsi komunikasi di ruang privat mahasiswa yang berpotensi menjadi krisis reputasi nasional. Kesimpulan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan teori manajemen krisis pada institusi yang memiliki beban ekspektasi moral tinggi di era viralitas media sosial.

REFERENSI

- Morissan. (2021). *Teori Komunikasi: Individu Hingga Massa*. Kencana.
- Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2017). *Theories of Human Communication* (11th ed.). Waveland Press.
- Hutapea, E. (2024). *Teori Komunikasi: Proses, Tatanan, dan Fungsi Teori Komunikasi dalam Penelitian*. PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Prastowo, A. (2021). Analisis Metode Studi Kasus dalam Penelitian Komunikasi Organisasi di Era Pandemi. *Jurnal Riset Komunikasi*, 4(1), 15–28.
- Haryanto, D., & Kurniawan, R. (2022). Metode Netnografi dan Analisis Konten Media Sosial dalam Membedah Krisis Reputasi Institusi. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 20(2), 112–125.
- Rhafidilla, N., & Yasmin, A. (2024). Persepsi Mahasiswa Mengenai Ruang Aman dari Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Jurnal Media dan Komunikasi (MEDKOM)*, 5(1), 45–60.
- Sari, A., & Rahardjo, B. (2023). Strategi Komunikasi Krisis Institusi Pendidikan dalam Menghadapi Isu Pelecehan Seksual: Perspektif SCCT. *Jurnal Komunikasi Massa*, 16(1), 88–102.
- Wibowo, T. (2022). Kecepatan Respons Digital dalam Manajemen Krisis Reputasi Kampus di Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi Indonesia*, 10(2), 134–148.
- Lestari, D., Pratama, M., & Handayani, S. (2024). Kepemimpinan dan Diplomasi Digital dalam Penanganan Skandal Etika Mahasiswa. *Jurnal Sosiohumaniora*, 26(1), 201–215.
- Humas Universitas Andalas. (2023). *Studi Kasus Penanganan Komunikasi Krisis pada Skandal Kekerasan Seksual: Laporan Analisis Komunikasi Internal*. Universitas Andalas.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*.